PANCACITA
BPBA

RANCANGAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA
TAHUN 2025

http://bpba.acehprov.go.id

JL. TGK. DAUD BEUREUEH NO. 18, KUTA ALAM,
BANDA ACEH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dapat menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengharuskan setiap Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk menyusun RENJA dengan mempedomani Rencana Pemerintah Aceh Tahun 2023-2026 dan Renstra BPBA 2023-2026.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, RPA Tahun 2023-2026 serta RKPA Tahun 2025 menempatkan prioritas Penanggulangan Bencana sebagai salah satu prioritas pembangunan Aceh dengan Sasaran Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Daerah Terhadap Bencana. Hal tersebut menjadi landasan pijak bagi SKPA - BPBA guna merumuskan Rancangan Perubahan Renja BPBA Tahun 2025. Hal tersebut sekaligus menjadi komitmen dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan Aceh yang terkait dengan penanggulangan bencana yang terukur dalam pengurangan Indek Risiko Bencana.

Qanun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh merupakan landasan yuridis untuk mewujudkan komitmen organisasi terkait pelaksanaan penanggulangan di Aceh. Oleh karena itu Rancangan Perubahan RENJA BPBA Tahun 2025 merupakan perwujudan integritas dan kapabilitas serta akuntabilitas dari setiap pejabat struktural, staf dan seluruh karyawan/karyawati dalam penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana. Sekaligus menjadi harapan sebagai pemandu dalam merencakan kegiatan penanggulangan bencana yang terintegrasi sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan peningkatan kapasitas daerah untuk menurunkan indek risiko bencana di Aceh.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pejabat dan staf BPBA yang telah berkonstribusi dalam penyusunan Rancangan Perubahan RENJA BPBA Tahun 2025. Segala kesempurnaan adalah milik Nya dan seluruh kekurangan milik hamba. Terima kasih.

Banda Aceh, 24 Maret 2025

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH
KEPALA PELAKSANA,

TEUKU NARA SETIA, SE.Ak, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760306 200112 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BPBA TAHUN 2024 ..... **8**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BPBA Tahun 2024 dan Capaian RENSTRA BPBA 8
2.1.1 Uraian Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil Yang Direncanakan 8
2.1.2 Uraian Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil Yang Direncanakan 9
2.1.3 Uraian Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Yang Direncanakan 9
2.1.4 Uraian Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhi atau Melebihi Target Kinerja 9
2.1.5 Uraian Implikasi Yang Ditimbulkan Terhadap Target Capaian Program RENSTRA BPBA 9
2.1.6 Uraian Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab 10
2.1.7 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan RENJA BPBA dan Pencapaian RENSTRA BPBA Tahun 2024 10
2.1.8 Perkiraan Tahun Berjalan/Tahun 2025 10
2.1.9 Realisasi Renstra BPBA Mengacu Pada Laporan Kinerja BPBA 10

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBA 11
2.2.1 Kajian Terhadap Capaian Kinerja Pelayanan BPBA 11
2.2.2 Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBA 12

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBA 12
2.3.1 Uraian Tingkat Kinerja Pelayanan BPBA 12
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan 13
2.3.3 Uraian Koordinasi dan Sinergi Program BPBA dengan BNPB 13
2.3.4 Dampak Permasalahan Terhadap Capaian Visi dan Misi Kepala Dearah Aceh, Capaian Program Nasional 14
2.3.5 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Layanan BPBA 14
2.3.6 Formulasi Isu-Isu Penting 15

2.4 Review Terhadap RKPA 2025 15
2.4.1 Uraian Tentang Perbandingan Antara RKPA Tahun 2025 dengan Analisis Kebutuhan 15
2.4.2 Penjelasan Mengenai Proses Tersebut Dilakukan 15
2.4.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPB 16

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 17

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 17
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPBA 17
3.3 Program dan Kegiatan BPBA 18
3.3.1 Penjelasan tentang Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan 18
3.3.2 Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan 18
3.3.3 Penjelasan Jika Rumusan Program/Kegiatan Tidak Sesuai Dengan RKPA 2025 19
3.3.4 Rencana Program dan Kegiatan BPBA dan Perkiraan Maju 19

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBA 20

BAB V P E N U T U P 21

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

LAMP.	JUDUL LAMPIRAN	Hal.
1	TABEL T - C 29. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BPBA dan PENCAPAIAN RENSTRA BPBA s.d TAHUN 2024	22
2	TABEL T - C 30. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	24
3	TABEL T – C 31. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH TAHUN 2025	25
4	TABEL T – C 32. USULAN PROGRAM dan KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTTINGAN/MASYARAKAT TAHUN 2024	29
5	TABEL T – C 33. RUMUSAN RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN SKPA TAHUN 2025 dan PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026	34

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kondisi geografis, geologi, hidrologis, dan demografis wilayah Aceh memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana. Kondisi alam yang kompleks telah menjadikan Aceh sebagai salah satu daerah berpotensi tinggi terhadap ancaman bencana, khususnya bencana alam dan non alam. Selain itu seiring dengan berjalannya waktu dan munculnya globalisasi telah mengakibatkan terkikisnya nilai-nilai luhur budaya masyarakat Aceh, yang bermuara pada lahirnya kondisi sosial politik yang dinamis dan unik. Kondisi sistem sosial yang semakin labil telah menggiring Aceh menjadi sebagai salah satu daerah yang memiliki sensitifitas tinggi/rawan terhadap terjadinya bencana sosial (konflik sosial).

Pada umumnya bencana alam meliputi bencana akibat fenomena geologi (gempa bumi, tsunami, gerakan tanah dan letusan gunung api), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, dan penyakit tanaman/ternak) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, dan pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia akibat perebutan sumber daya yang terbatas, konflik dengan alam, alasan ideologi, agama, dan politik.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Aceh saat ini telah bergerak mengikuti sistem penanggulangan bencana nasional. Perubahan cara pandang penanggulangan bencana dari yang bersifat responsif (tanggap darurat) ke arah pengurangan risiko bencana telah berjalan sesuai harapan. Hal ini ditandai dengan masuknya penanganan kondisi kejadian-kejadian prabencana, bencana, pasca bencana (tanggap darurat) dan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi) sebagai salah satu agenda pembangunan Aceh dalam RPA Tahun 2023-2026 ke depan.

a. Pengertian RENJA

Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Aceh Badan Penanggulangan Bencana Aceh adalah adalah dokumen rencana yang bersifat tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan Aceh Tahun 2025.

Tantangan penyelenggaraan pelayanan Penanggulangan Bencana (PB) pada waktu yang akan datang adalah tingginya Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Aceh (IRB 160). Hanya delapan Kabupatan/Kota dalam wilayah Aceh yang IRB - nya masuk kategori rendah (≤ 144), yaitu Kota Langsa 143, Kabupaten Pidie Jaya 138, Kabupaten Aceh Tenggara 131, Kota Sabang 126, Kabupaten Aceh Tengah 125, Kabupaten Bener Meriah 123, Kabupaten Gayo Lues 107 dan Kota Subulussalam 95. Kabupaten/kota diluar yang diuraikan itu, masuk dalam kategori berisiko tinggi atau IRB nya ≥ 144. Diantaranya adalah Kabupaten Aceh Besar (IRB 211) dan Kabupaten Aceh Tamiang (IRB 155). Fakta tersebut, menempatkan Provinsi Aceh pada tingkat ***Risiko Tinggi Mengalami Berbagai Ancaman Bencana Alam***. Pada situasi tersebut, Apa Yang Harus Dilakukan? Usulan program dan kegiatan yang tertuang dalam

Rancangan Perubahan Renja BPBA Tahun 2025 ini, merupakan tawaran jawaban untuk pertanyaan tersebut.

Pernyataan tersebut menjadi pendorong dalam merancang program dan kegiatan SKPA BPBA T.A 2025 sebagai wujud investasi pembangunan Aceh yang sensitif penurunan Indek Risiko Bencana sekaligus dapat meningkatkan Kapasitas Daerah Aceh/masyarakat.

b. Proses Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Aceh Badan Penanggulangan Bencana Aceh dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) terlebih dahulu membentuk tim penyusun Rancangan Renja Perubahan BPBA T.A 2025. Selanjutnya tim tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, membuat format pengumpulan data dan informasi Renja untuk ditabulasi oleh masing-masing bidang teknis lingkup unsur pelaksana BPBA. Data dan informasi dimaksud dibahas dan di interpreatasi sebagai basis argumentasi dalam merumuskan rencana kerja yang terdiri dari sasasan, indikator kinerja program, kegiatan dan pagu indikatif pendanaan sesuai dengan pagu indikatif Renstra BPBA.

c. Keterkaitan Rancangan Perubahan Rencana Kerja BPBA dengan Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2025.

Rancangan Perubahan Renja BPBA Tahun 2025, merupakan penjabaran sasaran dan prioritas pembangunan daerah Aceh tahun 2024 yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Perubahan T.A 2025 dan selaraskan dengan sasaran dan prioritas rencana pembanguan nasional sektor Penanggulangan Bencana Tahun 2025. Keterkaitan antara kedua dokumen perencanaan tersebut dapat dijabarkan bahwa salah satu tujuan pembangunan Aceh bertujuan Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Daerah Terhadap Bencana. Rancangan Renja Perubahan SKPA BPBA Tahun 2024 dijabarkan dalam program Penanggulangan Bencana dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dan kegiatan-kegiatan teknis untuk mencapai penurunan Indeks Risiko Bencana Aceh (IRB).

d. Keterkaitan Rancangan Perubahan Rencana Kerja BPBA dengan Kebijakan Strategis Badan Penanggulangan Bencana Nasional Tahun 2020-2024.

Rancangan Perubahan Renja BPBA Tahun 2025 diarahkan guna mendukung capaian sasaran pembangunan nasional bidang penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh BNPB, yang dalam hal ini Rencana Strategis BNPB tahun 2020-2024. Rencana Strategis BNPB Periode 2020 -2024 memprioritaskan program dan kegiatan penanggulangan bencana Tahun 2024 pada hasil perhitungan Indeks Risiko Bencana tahun 2024 menunjukkan 17 provinsi berada pada kelas risiko bencana tinggi dan 20 provinsi berada pada kelas risiko bencana sedang dan satu provinsi yang berada pada risiko bencana rendah.

Dalam Buku Indeks Risiko Bencana (IRB) Aceh Tahun 2024 menyebutkan, sebanyak 12 kabupaten/kota (52%) masih mempunyai nilai Indeks Risiko Bencana tinggi yaitu Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Barat daya, Aceh Jaya, Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Selatan, Bireun, Pidie, dan Simeulue Sedangkan 11 kabupaten/kota (48%) nilai Indeks Risiko Bencana Sedang yaitu Aceh Tamiang, Kota Langsa, Pidie Jaya, Aceh Tenggara, Kota Sabang, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, Kota Subulussalam, Kota Lhokseumawe dan Kota Banda Aceh merupakan kabupaten/kota dengan tingkat risiko bencana sedang. Fakta tersebut menjelaskan bahwa tidak ada kabupaten/kota dalam wilayah Aceh yang luput dari ancaman risiko bencana.

Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh mengacu pada sasaran meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah untuk menurunkan Indeks Risiko Bencana (IRB). Adapaun target dan realisasi indikator kinerja BPBA disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja BPBA

NO	URAIAN	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Kapasitas Daerah	0.58	0.54	0.60	054
2	Indeks Risiko Bencana	145/tinggi	146.9/tinggi	143/sedang	144.29/tinggi

Tabel diatas menggambarkan masih tingginya indeks risiko bencana di Aceh, oleh karena itu rencana kerja BPBA pada tahun mendatang difokuskan untuk meningkatkan indikator-indikator tersebut. Program dan kegiatan BPBA tahun 2025 telah difokuskan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana dengan indikator 1 dokumen
2. Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (per jenis bencana) dengan indikator 50 orang
3. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dengan indikator 3 kawasan
4. Pengedalian operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan indikator 1 dokumen
5. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana dengan indikator 20 orang.
6. Pengelolaan Risiko Bencana dengan indikator 3 kegiatan
7. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat 1 Kegiatan
8. Gladi Kesiapsiagaan Tehadap Bencana

Tindak Lanjut Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Tahun 2025.

Rancangan Perubahan Renja BPBA Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Aceh 2023-2026 dan Renstra BPBA Tahun 2023-2026. Target capaian sasaran Pembangunan Aceh sektor penanggulangan bencana Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam RKPA 2025 yang bertujuan Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Daerah Terhadap

Bencana dengan Arah kebijakan Penurunan IRB dengan peningkatan kapasitas daerah melalui upaya-upaya pencegahan dan peringatan dini. Target IRB pada Tahun 2025 yaitu 141 indeks/sedang. Langkah dan strategi utuk mencapainya dijabarkan dalam Rancangan Perubahan Renja BPBA Tahun 2025. Rancangan Perubahan Renja BPBA selanjutnya menjadi dasar untuk merumuskan Plafon Prioritas Anggaran Sementara SKPA BPBA. Pada akhirnya Rancangan Perubahan Renja BPBA Tahun 2025 menjadi dasar untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Belanja Aceh (RAPBA Perubahan) sektor layanan penanggulangan bencana di lingkungan Pemerintah Aceh.

1.2. Landasan Hukum

Dasar-dasar hukum yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh tersebut, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2008 tentang Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan UndangUndang, dan Kebijakan Administratif yang berkaitan Langsung dengan Pemerintahan Aceh;

18. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 53);
24. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032. (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9; Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9);
25. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh tahun 2013 – 2033, Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1;
26. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;
27. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
28. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Qanun Aceh Qanun Aceh tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus. (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
29. Qanun Aceh Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh. (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh 87);
30. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 104 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
31. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Pemerintah aceh

32. Peraturan Gubernur Aceh No. 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

a. Memberi dasar pijakan dalam rangka menjalankan kebijakan Pemerintah Aceh yang berkaitan langsung dengan upaya untuk mencapai sasaran pengurangan Indek Risiko Bencana Aceh.

b. Mengarahkan SKPA - BPBA dalam menjalakan tugas pokok dan fungsinya.

c. Meningkatkan kualitas dan efektifitas program pemerintah Aceh yang terkait dengan Penurunan Indek Risiko Bencana.

d. Sebagai referensi dan tolok ukur penilaian capaian kinerja.

Tujuan

a. Sebagai acuan perencanaan kerja untuk mewujudkan penurunan Indek Risiko Bencana Aceh.

b. Panduan pelaksanaan pelayanan penanggulangan bencana yang terpadu, terintegrasi, dan fokus pada tugas pokok dan fungsi BPBA.

1.4. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan Rancangan Perubahan Renja BPBA Tahun 2025, terdiri dari: Bab I terdiri (1) pendahuluan; (2) Pengertian Renja; (3) Proses Penyusunan; (4) Keterkaitan Rancangan Perubahan Renja dengan RENSTRA BPBA 2023–2026; (5) Keterkaitan Renja Perubahan BPBA Tahun 2025 dengan RENSTRA BNPB Tahun 2020-2024.

Bab II yang terdiri dari: (1) Hasil Evaluasi Renja BPBA Tahun 2024; (2) Hasil review capaian kinerja tahun 2023; (3) Realisasi capaian program /kegiatan yang tidak mencapai target; (4) Realisasi capaian program/kegiatan yang sesusi target; (5) Realisasi capaian program/kegiatan yang melampaui target; (6). Penjelasan faktor-faktor penyebab tidak tercapai target; Analisis kinerja Pelayanan Daerah; (7) Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA BPBA; (8) Review Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Aceh 2025; (9) Telaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III yang terdiri dari; (1) Telahaan kebijakan penanggulangan bencana nasional; (2) Tujuan dan sasaran Rancangan Perubahan Renja Perubahan BPBA; (3) Program dan Kegiatan. Bab IV yang menyajikan Rencana Kerja dan Pendanaan Indikator serta Bab V yang merupakan Penutup. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1 .1. Latar Belakang

1 .2. Landasan Hukum

1 .3. Maksud dan Tujuan

1 .4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBA TAHUN 2024

2 .1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra BPBA Tahun 2024

2 .2. Analisis Kinerja Pelayanan BPBA

2 .3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBA

2 .4 Review terhadap RKPA Perubahan 2025

BAB III. TUJUAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3. 1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3. 2. Tujuan dan Sasaran

3. 3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. P E N U T U P

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BPBA TAHUN 2024

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja SKPA terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Review hasil evaluasi pelaksanaan RENJA SKPA tahun 2024 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan BPBA dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra BPBA, serta hambatan permasalahan yang dihadapi. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA BPBA tahun-tahun sebelumnya.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BPBA TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA BPBA

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja BPBA Tahun 2024 dan pencapaian kinerja Rencana Strategis BPBA ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan BPBA dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Review terhadap evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan Tahun 2025 yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPA berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA tahun-tahun sebelumnya.

a. Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA BPBA Tahun 2024

BPBA pada Tahun Anggaran 2024 disamping melaksanakan program dan kegiatan rutin lazimnya sebuah SKPA, juga menyelenggarakan program dan kegiatan spesifik sektor penanggulangan bencana. Program inti untuk mewujudkan penurunan Indeks Risiko Bencana yang dilaksanakan BPBA pada T.A 2024 adalah Program Penanggulangan Bencana. Jumlah kegiatan yang secara langsung berkonstribusi terhadap penurunan indeks risiko bencana adalah empat kegiatan dengan 12 sub kegiatan. Capaian target realisasi yang paling tinggi 100% yakni pada sub kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana dan Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah. Tahun 2024 BPBA telah merealisasikan 2 Program dengan 10 Kegiatan dengan realisasi keuangan mencapai 99.30% dengan realisasi fisik 100%. Dengan penurunan indek risiko bencana 144.29/tinggi dari 146.9/tinggi, dan Index Ketahanan Daerah sedikit masih sama dengan sebelumnya yaitu 0,54.

Adapun rincian anggaran dan realisasi fisik dan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Aceh Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Rincian Anggaran dan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			(RP)	(%)	(%)

1	2	3	4	5	6
TOTAL BELANJA		**32.207.896.566**	**31.980.838.128**	**99.30**	**100**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**13.632.051.439**	**13.435.424.463**	**98.56**	**100**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	208.336.209	207.323.610	99.51	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.267.608.981	7.249.688.154	99.75	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.034.589.024	1.024.407.141	99.02	100
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	743.889.300	739.041.800	99.35	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.298.988.044	3.225.484.958	97.77	100
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.078.639.881	989.478.800	91.73	100
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**18.575.845.127**	**18.545.413.665**	**99.84**	**100**
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	3.588.987.987	3.576.688.820	99.66	100
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	8.984.404.682	8.969.020.265	99.83	100
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	4.088.733.211	4.086.628.760	99.95	100
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.913.719.247	1.913.075.820	99.97	100

2.1.1 Uraian Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil Yang Direncanakan.

Tidak ada realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil dan keluaran yang direncanakan, karena semua memenuhi target baik target keuangan maupun target fisik, yaitu rata-rata diatas 91% keuangan, dan realisasi fisik 100%.

2.1.2 Uraian Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil Yang Direncanakan.

Program inti untuk mewujudkan penurunan Indeks Risiko Bencana yang dilaksanakan BPBA pada T.A 2024 adalah program Penanggulangan Bencana. Jumlah kegiatan yang secara langsung berkonstribusi terhadap penurunan indeks risiko bencana adalah *empat kegiatan, 12 sub kegiatan*. Realisasi program kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil dan keluaran yang direncanakan (mendekati 100%) adalah sebanyak 10 sub kegiatan.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hampir semua kegiatan rutin telah memenuhi target yang direncanakan. Dapat dilihat dari realisasi fisik 100% dan keuangan diatas 82%. Begitu juga untuk program dan kegiatan bidang teknis hampir seluruhnya memenuhi target dengan realisasi keuangan rata-rata 91% dan realisasi fisik 100%.

2.1.3 Uraian Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Yang Direncanakan

Hampir semua sub kegiatan melebihi target kinerja karena hampir semua merealisasikan secara fisik 100 persen dan realisasi keuangan 91%. Hal ini terjadi karena adanya APBA Perubahan dan sisa anggaran dikembalikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Aceh.

2.1.4 Uraian Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhi atau Melebihi Target Kinerja

Tidak ada realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil dan keluaran yang direncanakan

2.1.5 Uraian Implikasi Yang Ditimbulkan Terhadap Target Capaian Program Renstra BPBA

Secara keseluruhan capaian target kinerja program dan kegiatan BPBA berimplikasi positif terhadap target capaian program yang telah tertuang dalam RENSTRA BPBA tahun 2023-2026

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah belum tercapainya target Penurunan Indek Risiko Bencana dari 146.9/tunggi menjadi 144.29/tinggi dan Indeks Kapasitas Daerah tetap yaitu sebesar 0,54/sedang

2.1.6 Uraian Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah memperkuat program dan kegiatan untuk mencapai 7 Prioritas peningkatan ketahanan dengan 71 Indikator.

2.1.7 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja BPBA dan Pencapaian Renstra BPBA Tahun 2024.

Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja BPBA dan Pencapaian Renstra BPBA 2023-2026, lihat Lampiran 1 (Tabel T-C 29).

2.1.8. Perkiraan Tahun Berjalan/Tahun 2024

Pelaksanaan program dan kegiatan BPBA T.A 2025 diperkirakan akan mencapai 95%. Sedikit meningkat dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan pada beberapa kegiatan berjalan sesuai dengan proses perencanaan dengan memfokuskan pada kegiatan-kegiatan Peningkatan Ketahanan Daerah terhadap bencana.

2.1.9. Realisasi Renstra BPBA Mengacu Pada Laporan Kinerja BPBA

Berdasarkan laporan tahunan kinerja BPBA tahun 2024 dapat dijelaskan bahwa target kinerja Renstra BPBA yang diukur melalui pengelompokan sebagai berikut:

1. Indek Risiko Bencana mencapai 144.29/tinggi dari tahun sebelumnya 146.9/tinggi.
2. Indeks Kapasitas Daerah tetap yaitu 0.54/sedang dari tahun sebelumnya 0.54/sedang.
3. Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah manejemen Kebakaran (WMK) sebesar 79.4%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BPBA

2.2.1 Kajian Terhadap Capaian Kinerja Pelayanan BPBA

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BPBA berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi. BPBA mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penanggulangan bencana yang terdiri dari fase pra bencana/fase tidak terjadi bencana, fase situasi terdapat potensi bencana, fase saat terjadi bencana/tanggap darurat bencana, fase peralihan darurat bencana dan fase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Penyelenggaraan pelayanan penangulangan bencana pada fase pra bencana/fase tidak terjadi bencana difokuskan untuk menyusun perencanaan penanggulangan bencana (Penyusunan/review KRB, RPB, dan Renkon) yang meliputi: (1) pengenalan dan pengkajian ancaman bencana; (2) pemahaman tentang kerentanan masyarakat; (3) analisis kemungkinan dampak bencana; (4) pilihan tindakan pengurangan risiko bencana; (5) penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; (6) dan alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.

Penyelenggaraan pelayanan penangulangan bencana pada fase situasi terdapat potensi bencana difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana. Upaya-upaya ini meliputi: (1) peningkatan kualitas dan kuantitas peralatan pendukung pelayanan penanggulangan bencana; (2) Penyelenggaraan latihan/gladi kesiapsiagaan, (3) Penyusunan rencana kontijensi, (4) peningkatan performa kinerja Pusdalops PB; dan (5) manajemen data kebencanaan/pusat data dan informasi bencana.

Penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana pada fase saat terjadi bencana/tanggap darurat bencana difokuskan pada upaya untuk melakukan: (1) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya; (2) penentuan status keadaan darurat bencana; (3) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; (4) pemenuhan kebutuhan dasar; (5) perlindungan terhadap kelompok rentan, dan (6) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Penyelenggaraan pelayanan penangulangan bencana pada fase saat setelah terjadi bencana difokuskan pada 2 (dua) upaya yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi dengan cakupan pelayanan sebagai berikut: (1) perbaikan lingkungan daerah bencana; (2) perbaikan prasarana dan sarana umum; (3) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; (4) pemulihan sosial psikologis; (5) pemulihan sosial, ekonomi dan budaya; (6) pemulihan fungsi pemerintahan; (7) pemulihan fungsi pelayanan publik; (8) pembangunan kembali prasarana dan sarana; (9) pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; (10) pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; (11) penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; (12) partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarkatan, dunia usaha dan masyarakat; (13) peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya; (14) peningkatan fungsi pelayanan publik, dan (15) peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

2.2.2 Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBA

Pencapaian kinerja BPBA tahun anggaran 2024 yaitu penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB), Indek Risiko Bencana pada capaian awal yaitu 160/sedang, dan di tahun 2024 menjadi 144.29/tinggi. Tolok ukur Pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah diatur dengan Standar Pelayanan Minimal yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, serta 71 indikator kapasitas daerah untuk penilaian Indeks kapasitas Daerah yang digunakan untuk penilaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Aceh.

Dengan kata lain SPM bidang penanggulangan bencana tidak dilimpahkan kepada pemerintah provinsi kecuali untuk Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dengan demikian BPBA sebagai representasi Pemerintah Aceh sebagai wakil Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah kabupaten/kota secara umum dan teknis melalui penetapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK). Sebagai NSPK sub urusan penanggulangan bencana dalam RPA 2023-2026, RKPA 2025, Renstra BPBA 2023-2026 dan RENJA BPBA 2025 telah menetapkan Program Penanggulangan Bencana dengan kegiatan spesifik yang berjumlah empat kegiatan, 17 sub kegiatan sebagai acuan bagi BPBD kabupaten/kota dalam menerapkan SPM. Indikator, Indek Kinerja Khusus, Target, Realisasi dan Proyeksi Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBA sebagai sasaran untuk mewujudkan IRB. Lihat lampiran 2 (Tabel T – C 30).

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BPBA

2.3.1 Uraian Tingkat Kinerja Pelayanan BPBA

Organisasi menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja pelayanan penanggulangan bencana Badan Penanggulangan Bencana Aceh. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumebr daya manusia serta sarana dan prasana. Melalui Qanun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh.

Untuk menjalankan tugas, fungsi dan tata kerja BPBA, Kepala Pelaksana BPBA bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh. Dalam menjalankan fungsinya kepala BPBA atas nama Gubernur Aceh mengangkat seorang Kepala Pelaksana BPBA yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBA. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Pelaksana BPBA dibantu oleh satu kepala bagian dan tiga kepala bidang. Masing-masing bagian dan bidang tersebut, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian/Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBA sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun Kegiatan-kegiatan reguler yang diselenggarakan BPBA adalah Penyusunan Kajian Risiko bencana, Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukadi (KIE) Rawan Bencana, Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Pengelolaan Risiko Bencana, pengendalian Operasi dan penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Penguatan Kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, Penyediaan Peralatan dan dan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana, Pengembangan Kapasitas Tim reaksi Cepat, Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah, Pengelolaan dan Pemenfaatan Sistem Informasi Kebencanaan, Kerjasama Antara Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana, Penanganan darurat bencana, penguatan logistik dan peralatan penanggulangan bencana, dan Penanganan Pasca Bencana.

Dengan demikian BPBA mulai tahun 2023-2026 memfokuskan pada upaya adaptasi dan mitigasi bencana melalui program dan kegiatan interventif pada 23 kabupaten/kota. Menjadi harapan bahwa pada akhirnya Pemerintah Aceh dapat berkonstribusi secara optimal dalam mendukung kebijakan program nasional sektor penanggulangan bencana yang terukur melalui penurunan indek risiko bencana.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat tersebut, maka yang menjadi isu strategis penanggulangan bencana untuk empat tahun (2023-2026) adalah:

1. Perlunya Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan Dalam Penanggulangan Bencana.

2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik
4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

2.3.3 Uraian Koordinasi dan Sinergi Program BPBA dengan BNPB

Telaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan masyarakat yang direpresentasikan melalui usulan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2025 yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPBA.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini berasal dari usulan para pihak baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan forum pengurangan risiko bencana. Pengumpulan informasi ini dilakukan melalui angket yang disebarkan oleh BPBD Kabupaten/Kota dan pengamatan pelaksanaan yang akan dilakukan pada saat berlangsungnya pramusrenbang (kabupaten/kota). Telaahan/kajian usulan program dan kegiatan masyarakat disajikan pada Lampiran 3.

2.3.4 Dampak Permasalahan Terhadap Capaian Visi dan Misi Kepala Dearah Aceh, Capaian Program Nasional.

Secara nasional Provinsi Aceh Tahun menempati peringkat *ke 9* sebagai provinsi dengan risiko tinggi untuk terjadinya berbagai macam bencana alam *(indeks 144.29/tinggi).* Sedangkan secara regional Sumatera, Provinsi Aceh menempati peringkat ke 8 di bawah Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Riau sebagai provinsi dengan risiko bencana tinggi.

KRB Aceh 2021-2025 secara metodologis menjelaskan situasi tingkat risiko bencana Provinsi Aceh. Tingkat risiko bencana yang tertinggi adalah risiko bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi pantai, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, letusan *Gunong Peut Sagoe*, letusan *Gunong Seulewah Agam*, tanah longsor, dan tsunami. Tingkat risiko bencana sedang kemungkinan terjadi untuk bencana epidemi dan wabah penyakit, kekeringan, dan letusan Gunungapi Burnitelong.

Permasalahan Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan kebijakan nasional dan wajib mendapat dukungan dari pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota. Menurunkan IRB merupakan kegiatan lintas sektoral yang melibatkan beberapa SKPA. Capaiannya berkonstribusi positif terhadap perwujudan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goals),* terutama untuk menwujudkan indikator Indeks Risiko Bencana Indonesia.

2.3.5 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan BPBA

Analisis terhadap Renja BNPB dan Renstra BPBA serta Renstra BPBD Kabupaten/Kota sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan penanggulangan bencana, mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah yang dikhawatirkan terhadap bencana. Hal ini disebabkan Aceh merupakan salah satu wilayah yang memiliki sejarah kejadian bencana terbesar. Beberapa bencana yang terjadi menimbulkan bencana baru lainnya (bencana turunan) dengan dampak yang sama dahsyatnya. Aceh pernah mengalami gempa bumi yang mengakibatkan korban jiwa (meninggal dan luka-luka), kerugian harta benda baik yang berwujud fisik dan ekonomi lainnya pada tanggal 26 Desember 2004. Risiko ini dengan munculnya bencana tsunami yang mengakibatkan 166.541 jiwa meninggal, 1.129 luka-luka 6.220 jiwa hilang, 322.821 rumah rusak berat, 96.576 rumah rusak ringan yang berdasarkan pencatatan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI). Selain itu, berdasarkan catatan DIBI tersebut, gempa bumi dan tsunami pernah terjadi pada tahun 1797, 1891, 1907, 1936 1964, 1967, 1983, 1990, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016 yang memberikan dampak masing masingnya.

2.3.6 Formulasi Isu-Isu Penting

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan BPBA, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas, capaian terhadap visi dan misi Gubernur Aceh, capaian program nasional dan tantangan dan peluang. Adapun permasalahan penanggulangan di Aceh antara lain:

1. Karakteristik wilayah Aceh yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan dampak bencana berupa kehilangan, kerugian dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik. Berdasarkan catatan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), Aceh memiliki 11 potensi bencana; banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, letusan gunung api, cuaca ekstrim, dan tanah longsor. Jumlah kejadian bencana periode 2019 s.d. 2023 sebanyak 3136 kali kejadian bencana, dengan taksiran kerugian akibat bencana mencapai 1,5 Triliun.
2. Indeks Risiko Bencana Aceh masih tinggi yakni mencapai 144.29/tinggi sedangkan rata-rata nasional sebesar 128.52/sedang yang menjadikan Aceh sebagai daerah risiko tinggi.
3. Masih rendahnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana di Aceh, bila bandingkan dengan tingginya intensitas bencana dan luasnya wilayah Aceh yang rawan bencana. Indeks Kapasitas Daerah (IKD) tahun 2024 sebesar 0.54 kategori sedang, dan masih perlu ditingkatkan untuk menurunkan Indeks Risiko Bencana (IRB), karena IKD juga merupakan salah satu indikator dalam penilaian IRB.

Isu strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu:

1. Perlunya upaya peningkatan kapasitas daerah dalam pengurangan risiko bencana dengan memperhatikan 7 prioritas dan 71 indikator yang akan digunakan dalam penilaian Indeks Kapasitas Daerah Ketujuh prioritas tersebut antara lain:

   (a) Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan,

   Ditekankan pada peraturan daerah tentang penanggulangan bencana, Pembentukan Forum PRB, Peraturan tentang Penyebaran informasi Kebencanaan, Kebijakan daerah tentang Pengurangan Risiko Bencana (PRB), Komitmen DPRD terhadap PRB.

   (b) Pengkajian Risiko dan Perencanaan terpadu,

   Ditekankan pada ketersediaan Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)

   (c) Pengembangan Sistem Informasi dan Diklat Logistik,

   Ditekankan pada Sarana Penyampaian informasi kebencanaan, Pusdalops, sistem pendataan bencana, Pelatihan dan sertifikasi Penggunaan peralatan PB, Penyelenggaraan gladi kesiapsiagaan, Kajian kebutuhan peralatan dan logistik, Pergudangan logistic PB, Ketersediaan energi listrik, dan Pemenuhan pangan daerah saat darurat bencana.

   (d) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana,

   Ditekankan pada penataan ruang berbasis Pengurangan Risiko Bencana, Sekolah Madrasah Aman Bencana, Rumah Sakit Aman Bencana, Puskesmas Aman Bencana, dan Desa Tangguh Bencana.

   (e) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana,

   Ditekankan pada Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana banjir, longsor, Karhutla, kekeringan, banjir bandang, gempa bumi, dan tsunami.

   (f) Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana

   Ditekankan pada Penyusunan rencana Kontijensi, sistem peringatan dini dan rencana evakuasi Gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, Kebakaran hutan dan lahan, erupsi gunung api, kekeringan, banjir bandang, Penentuan Status Tanggap Darurat, Sistem Komando Operasi Darurat, Pengerahan Tim Kaji cepat daan Tim penyelamatan dan pertolongan korban, Perbaikan Darurat dan Penghentian Status Darurat Bencana.

   (g) (g) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

   Ditekankan pada Pemulihan pelayanan dasar, infrastruktur penting, perbaikan rumah penduduk, dan penghidupan masyarakat.

2.4 Review Terhadap RKPA 2025

Program dan kegiatan rutin dan program spesifik sektor penanggulangan bencana yang telah tertuang dalam RKPA tahun 2025 memuat program dan kegiatan yang satu sama lain dapat menunjang pencapaian sasaran yaitu penuruan IRB Aceh. Secara keseluruhan program dan kegiatan dimaksud telah merepresentasikan upaya pemerintah Aceh guna menurunkan IRB.

2.4.1 Uraian Tentang Perbandingan Antara RKPA Perubahan Tahun 2025 Dengan Analisis Kebutuhan.

Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana dan Program Penanggulangan Bencana dengan masing-masing kegiatan pendukungnya sebagaimana tertuang dalam RKPA 2025 menunjukan keseimbangan kebutuhan pendanaan indikatif. Hal tersebut sangat mendukung upaya untuk menurunkan IRB Aceh.

2.4.2 Penjelasan Mengenai Proses Tersebut Dilakukan

Alasan dilakukan keseimbangan antara kebutuhan indikatif anggaran adalah untuk menjaga keberlanjutan pelaksanaan program dan kegiatan guna menurunkan IRB Aceh sesuai dengan target indikator yang telah ditetapkan.

2.4.3 Tabel Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPA 2025

Lihat Lampiran 3 (Tabel C – 31)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisi uraian tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan BPBA Tahun 2025. Landasan dalam perumusan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu dilakukan telaahan terhadap kebijakan nasional terkait penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana yang mencakup keseluruhan aspek pelayanan. Telaahan ini merupakan upaya untuk memaduserasikan program dan kegiatan penanggulangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh sehingga terwujud satu kesatuan capaian indikator.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan kebijakan nasional/BNPB terkait program dan kegiatan penanggulangan bencana berguna untuk mewujudkan keterpaduan, keserasian, saling mendukung capaian kinerja antara Pemerintah Nasional dengan Pemerintah Aceh/BPBA. Sebagai acuannya digunakan kebijakan pembangunan nasional khususnya yang terkait dengan penanggulangan bencana sebagai mana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, maupun yang dirumuskan dalam RPA 2023-2026. Fokusnya pada prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2025 yaitu Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, dengan Kegiatan Prioritas Nasional yaitu Ketahanan Bencana Infrastruktur, dengan Program Daerah yaitu Program Penanggulangan Bencana dan Indikatornya yaitu Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang digunakan untuk penilaian Indeks Risiko Bencana (IRB).

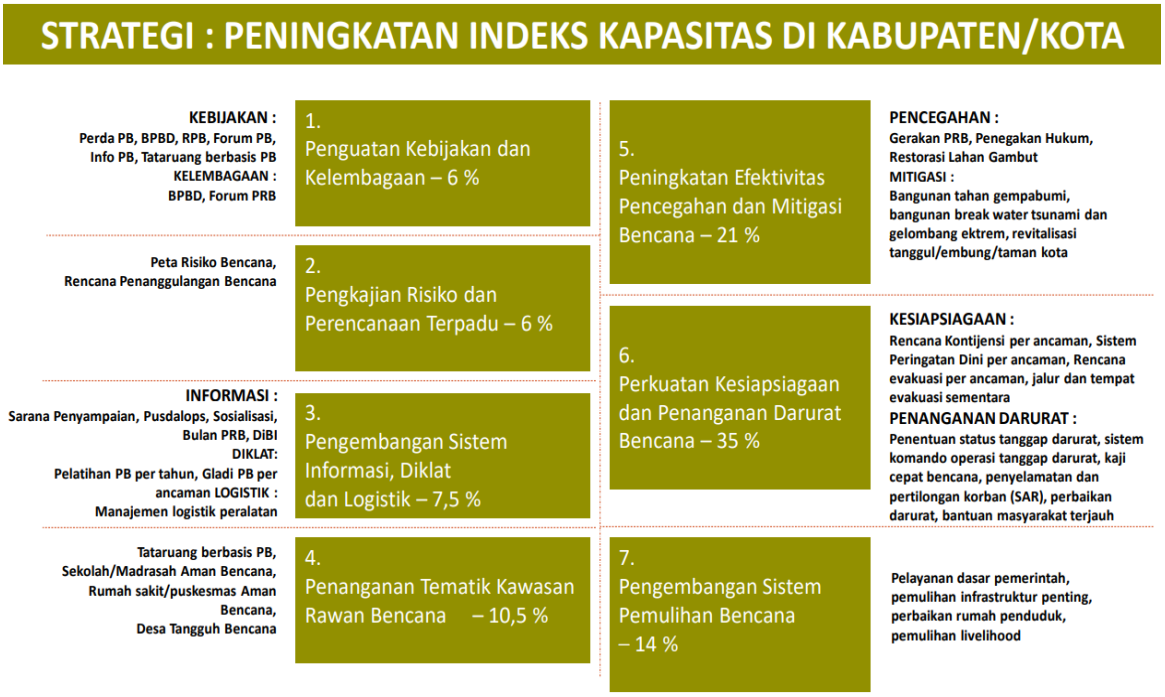
Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana sendiri tertuang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Penanggulangan bencana yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut memuat aktivitas yaitu pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Semua aktivitas tersebut dilaksanakan dalam rangkaian kerja holistik-berkesinambunga dengan kerangka menyukseskan pembangunan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA BPBA

Tujuan dan sasaran merupakan bahagian dari tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusuna Renstra BPBA selama lima tahun.

Sasaran dalam Penanggulangan Bencana adalah menurunnya Indeks Risiko Bencana pada pusat pertumbuhan berisiko tinggi dengan memperkuat kapasitas seluruh Kab/Kota di Indonesia sesuai dengan ancaman bencana masing-masing. Strategi untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas di Kabupaten/Kota antara lain dengan menerapkan 7 (tujuh) prioritas (Gambar 3.1):

1. Penguatan Kebijakan dan kelembagaan
2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik
4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigas Bencana
6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana



Gambar 3.1 Strategi Peningkatan Indeks Kapasitas Daerah di Kabupaten/Kota

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN BPBA

Kegiatan adalah media untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang akan dilakukan untuk menilai tingkat capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil sebagaimana yang telah direncanakan BPBA guna mencapai sasaran. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pelayanan penanggulangan bencana dapat diatasi sesuai dengan dukungan sumberdaya yang tersedia. Program dan Kegiatan BPBA Perubahan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025 beserta prognosa. Lihat lampiran 5 (Tabel C – 33).

3.3.1 Penjelasan tentang Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan

Program dan kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana tertuang dalam Rancangan Perubahan Renja BPBA Tahun 2025 dirumuskan dengan dengan mempertimbangkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026, yaitu Meningkatkan Kapasitas Daerah terhadap Bencana dengan Indikator Tujuan/Sasaran adalah Indeks Risiko Bencana (IRB). Target Indikator Tahun 2025 sebesar 141 indek/sedang.

3.3.2 Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan BPBA tahun 2025 dibagi dalam dua kategori yaitu:

a. Program dan Kegiatan Generik

Program generik BPBA terdiri dari (1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan total jumlah kegiatannya sebanyak 6 (enam) kegiatan, dan 16 (enam belas) sub kegiatan.

b. Program Spesifik Penanggulangan Bencana

Program spesifik penanggulangan bencana terdiri dari Program Penanggulangan Bencana, dengan jumlah total jumlah kegiatan sebanyak 4 (empat) kegiatan.

3.3.3 Penjelasan Jika Rumusan Program/Kegiatan Tidak Sesuai Dengan RKPA 2025

Seluruh program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja Perubahan BPBA tahun 2025 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Aceh Perubahan tahun 2025.

3.3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan BPBA dan Perkiraan Maju

Lihat Tabel T – C 33 (Lampiran 4).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH TAHUN 2025

Fokus dan prioritas pembangunan Aceh bidang penanggulangan bencana diarahkan pada upaya-upaya Pengurangan Indeks Risiko Bencana Aceh dan Peningkatan Kapasitas Daerah dalam menghadapi bencana. Berpedoman pada kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat Aceh sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPA 2023-2026, Badan Penanggulangan Bencana Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan mengimplementasi atau menjalankan **Program Penanggulangan** sebagai prioritas utama**.** Program prioritas tersebut menjadi bisnis utama sektor pembangunan penanggulangan bencana lima tahunan.

Hal tersebut merupakan komitmen nyata seluruh pejabat struktural dan staf lingkup Badan Penanggulangan Bencana Aceh guna mewujudkan pencapaian indikator pengurangan Indeks Risiko Bencana serta meningkatkan kapasitas daerah, yang dijabarkan secara terperinci dan terukur dalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi seluruh unit kerja eselon 3 (tiga) dan 4 (empat) dan secara hirarkhi saling terkait satu sama lain guna mendukung mewujudkan pencapaian kinerjanya tahunan/lima tahunan eselon 2 (dua) Satuan Kerja Perangkat Aceh Badan Penanggulangan Bencana Aceh.

Pelaksanaan kegiatan dan pendanaan BPBA Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan maupun rapat koordinasi sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip tersebut akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya. Rencana kerja dan pendanaan BPBA Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025.

BAB V

PENUTUP

Rancangan Perubahan Renja BPBA Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan guna mewujudkan tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPA BPBA sebagai strategi untuk merealisaikan tujuan pembanguan Pemerintah Aceh. Rancangan Perubahan Renja BPBA Tahun 2025 adalah acuan perencanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2025 yaitu penurunan indek risiko tahunan dengan target 141/sedang, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan penyusunan RKA, DPA APBA Perubahan Tahun 2025.

TABEL T - C 29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BPBA DAN
PENCAPAIAN RENSTRA BPBA S.D TAHUN 2024
PROVINSI ACEH

No	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPA/Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026			Target kinerja dan Anggaran RKPA-P Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA Provinsi yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPA/Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPA/Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4	5			7											16
			K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Rp	
	Urusan Pemerintahan Wajib Terkait Pelayanan Dasar				146.751.994.301			33.381.564.040			31.980.838.128			31.980.838.128		21,79	BPBA
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				146.751.994.301			33.381.564.040			31.980.838.128			31.980.838.128		21,79	BPBA
43	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran**	**95**	**%**	**58.224.231.844**	**95**	**%**	**13.632.051.439**		**%**	**13.435.424.463**		**%**	**13.435.424.463**		**23,08**	**BPBA**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD**	**100**	**%**	**1.110.807.682**	**6**	**Dokumen**	**208.336.209**	**6**	**Dokumen**	**207.323.610**	**6**	**Dokumen**	**207.323.610**	**sts**	**18,66**	**BPBA**
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dokumen	1.110.807.682	6	Dokumen	208.336.209	6	Dokumen	207.323.610	6	Dokumen	463.081.905	100	41,69	BPBA
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Lancarnya kegiatan pelayanan administrasi Keuangan**	**12**	**Bulan**	**30.560.234.452**	**12**	**Bulan**	**7.267.608.981**	**12**	**Bulan**	**7.249.688.154**	**12**	**Bulan**	**7.249.688.154**	**100**	**23,72**	**BPBA**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	29.869.166.250	46	Orang/Bulan	7.195.473.081	48	Orang/Bulan	7.178.284.404	48	Orang/Bulan	7.178.284.404	sts	24,03	BPBA
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	Bulan	691.068.202	1	Laporan	72.135.900	1	Laporan	71.403.750	1	Laporan	71.403.750	sts	10,33	BPBA
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Lancarnya kegiatan pelayanan kepegawaian**	**269**	**Stel**	**839.181.338**										**sts**		**BPBA**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	269	Stel	839.181.338										sts		BPBA
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Lancarnya pelayanan administrasi umum perkantoran**	**12**	**Bulan**	**8.636.000.947**	**12**	**Bulan**	**1.034.589.024**	**12**	**Bulan**	**1.024.407.141**	**12**	**Bulan**	**1.024.407.141**	**100**	**11,86**	**BPBA**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	822	Buah	297.194.704	5	Paket	53.625.038	5	Paket	53.053.758	5	Paket	53.053.758	sts	17,85	BPBA
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"	153	Unit/Buah	3.391.502.240	5	Paket	121.378.500	5	Paket	118.343.500	5	Paket	118.343.500	sts	3,49	BPBA
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	"Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan"	12	Bulan	1.422.629.166	5	Paket	181.388.981	5	Paket	175.780.147	5	Paket	175.780.147	sts	12,36	BPBA
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Bulan	941.625.544	5	Paket	213.179.212	5	Paket	212.895.580	5	Paket	212.895.580	sts	22,61	BPBA
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	234	Eks	91.029.840	5	Dokumen	18.026.400	5	Dokumen	17.936.000	5	Dokumen	17.936.000	sts	19,70	BPBA
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD"	80	Kali	2.492.019.452	20	Laporan	446.990.893	18	Laporan	446.398.156	18	Laporan	446.398.156	sts	17,91	BPBA
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**6**	**Unit**	**2.067.997.975**	**4**	**Unit**	**743.889.300**	**5**	**Unit**	**739.041.800**	**5**	**Unit**	**739.041.800**	**83**	**35,74**	**BPBA**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	Unit	2.067.997.975	4	Unit	743.889.300	5	Unit	739.041.800	5	Unit	739.041.800	83	35,74	BPBA
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran**	**12**	**Bulan**	**7.227.867.567**	**12**	**Bulan**	**3.298.988.044**	**12**	**Bulan**	**3.225.484.958**	**12**	**Bulan**	**3.225.484.958**	**100**	**44,63**	**BPBA**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	80.426.933	10	Laporan	17.592.000	10	Laporan	14.550.000	10	Laporan	14.550.000	sts	18,09	BPBA
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Bulan	1.696.010.051	12	Laporan	388.434.444	12	Laporan	375.327.958	12	Laporan	375.327.958	sts	22,13	BPBA
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Bulan	5.451.430.584	12	Laporan	2.892.961.600	12	Laporan	2.835.607.000	12	Laporan	2.835.607.000	sts	52,02	BPBA

No	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPA/Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026			Target kinerja dan Anggaran RKPA-P Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA Provinsi yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPA/Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPA/Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4	5			7											16
			K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah**	**100**	**%**	**7.782.141.884**	**100**	**%**	**1.078.639.881**		**%**	**989.478.800**		**%**	**989.478.800**		**12,71**	**BPBA**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Bulan	5.291.669.766	50	unit	840.567.081	50	unit	753.501.700	50	unit	753.501.700	sts	14,24	BPBA
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	135	Unit	2.490.472.117	120	unit	238.072.800	120	unit	235.977.100	120	unit	235.977.100	89	9,48	BPBA
44	**Program Penanggulangan Bencana**	**Indeks Ketahanan Daerah**	**0,6**	**/Sedang Indeks**	**82.053.750.708**	**0,58**	**/Sedang Indeks**	**19.749.512.601**		**/Sedang Indeks**	**18.545.413.665**		**Sedang Indek**	**18.545.413.665**		**22,60**	**BPBA**
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	**Jumlah Kegiatan Sosialisasi komunikasi edukasi bencana**	**50**	**%**	**6.159.183.936**	**35**	**%**	**3.592.987.987**		**%**	**3.576.688.820**		**%**	**3.576.688.820**		**58,07**	**BPBA**
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	"Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi"	2	Dokumen	1.521.763.709	4	Dokumen	1.692.725.000	2	Dokumen	1.692.689.000	2	Dokumen	1.692.689.000	100	111,23	BPBA
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	29	Jenis	4.637.420.227	60	Orang	1.900.262.987	60	Orang	1.883.999.820	60	Orang	4.457.491.252	sts	96,12	BPBA
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**Jumlah kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**50**	**%**	**46.184.086.543**	**35**	**%**	**9.595.404.682**		**%**	**8.969.020.265**		**%**	**8.969.020.265**		**19,42**	**BPBA**
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalkan	1	Dokumen	1.018.867.268	4	Dokumen	927.198.000	4	Dokumen	926.977.518	4	Dokumen	926.977.518	400	90,98	BPBA
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	840	Orang Unit	4.563.166.449	120	Orang	500.000.000	120	Orang	498.983.650	120	Orang	498.983.650	sts	10,94	BPBA
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	"Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana"	12 2 2	Bulan Unit Paket	6.568.904.844	5	Dokumen	1.048.727.563	5	Dokumen	1.048.725.992	5	Dokumen	1.048.725.992	sts	15,97	BPBA
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	"Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana"	7	Paket	7.241.635.195	6	unit	3.153.245.320	6	unit	2.537.129.150	6	unit	2.537.129.150	sts	35,04	BPBA
	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	2 4 1 1	Desa Lokasi Kegiatan Kegiatan	6.342.622.994	1	Kegiatan	3.382.981.457	1	Kegiatan	3.380.191.740	1	Kegiatan	3.380.191.740	sts	53,29	BPBA
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	6	Kegiatan	5.223.341.040	5	Kawasan	583.252.342	5	Kawasan	577.012.215	5	Kawasan	1.595.145.934	sts	30,54	BPBA
	Penanganan Pascabencana Provinsi		4 3 23 23 145 5	Dok Kegiatan Kab/Kota Kab/Kota Paket Paket	13.181.939.470										sts		BPBA
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	"Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana"	150	Orang	798.950.168												
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	"Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi	1	Kali	1.244.659.114												
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**92**	**%**	**23.980.465.808**	**1.600**	**Orang**	**4.344.574.479**		**Orang**	**4.086.628.760**		**Orang**	**4.086.628.760**	**sts**	**17,04**	**BPBA**

No	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPA/Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026			Target kinerja dan Anggaran RKPA-P Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPA Provinsi yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPA/Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPA/Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4	5			7											16
			K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Rp	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Jumlah laporan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**				**10**	**Laporan**			**Laporan**			**Laporan**		**tdr**	**tdr**	**BPBA**
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	23	Kab/Kota	7.423.025.865	5	Laporan	200.470.209	5	Laporan	200.187.972	5	Laporan	200.187.972	sts	2,70	BPBA
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	23	Kab/Kota	16.557.439.943	23	Orang	4.144.104.270	23	Orang	3.886.440.788	23	Orang	3.886.440.788	sts	23,47	BPBA
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**Jumlah laporan pelaksanaan pengatan sistem dasar penanggulangan bencana**	**100**	**%**	**5.730.014.420**	**4**	**Laporan**	**2.216.545.453**		**Laporan**	**1.913.075.820**		**Laporan**	**1.913.075.820**	**sts**	**33,39**	**BPBA**
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1	Dokumen	854.443.268										sts		BPBA
	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	"Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah"	3	Kegiatan	2.486.380.316	1	Dokumen	606.000.000	1	Dokumen	606.000.000	1	Dokumen	606.000.000	sts	24,37	BPBA
	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1	Kegiatan	854.443.268										sts		BPBA
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	4	Kegiatan	1.534.747.568										sts		BPBA
	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun				20	Dokumen	1.610.545.453	10	Dokumen	1.307.075.820	10	Dokumen	1.307.075.820	tdr	tdr	BPBA
45	**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran**	**"Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)"**	**68**	**%**	**6.474.011.750**	**60**	**%**			**%**			**%**				**BPBA**
	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	**Jumlah Kegiatan Pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran**	**68**	**%**	**6.474.011.750**	**3**	**Kegiatan**			**Kegiatan**			**Kegiatan**		**sts**		**BPBA**
	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	**Jumlah Kegiatan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**				**60**	**%**			**%**			**%**		**tdr**	**tdr**	**BPBA**
	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	74	Unit	829.460.280										sts		BPBA
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	"Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait"	12	Paket	4.815.091.191										sts		BPBA
	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	120	Orang	829.460.280										sts		BPBA

Banda Aceh, Maret 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH
KEPALA PELAKSANA

Teuku Nara Setia, Se, Ak, M. Si
PEMBINA Tk. I
NIP. 19760306 200112 1 005

Tabel T - C 30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH

No.	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA BPBA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Risiko Bencana			145/ Indek tinggi	143/ Indek sedang	141/ Indek sedang	139/ Indek sedang	146,9/ Indek tinggi	144,29/ Indek tinggi	141/ Indek sedang	139/ Indek sedang	
2	Indeks Kapasitas Daerah			0,58/ Indek sedang	0,60/ Indek sedang	0,62/ Indek sedang	0,64/ Indek sedang	0,54/ Indek sedang	0,54/ Indek sedang	0,62/ Indek sedang	0,64/ Indek sedang	
3	Tingkat Waktu Tanggap (respons time rate) daerah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)			60 %	62 %	65 %	68 %	30 %	79,4 %	65 %	68 %	
TOTAL												

Banda Aceh, Maret 2025

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH

KEPALA PELAKSANA

Teuku Nara Setia, SE, Ak, M.Si

Pembina TK.I

NIP. 19760306 200112 1 005

TABEL T - C 31

REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH TAHUN 2025

PROVINSI ACEH

Nama SKPA : Badan Penanggulangan Bencana Aceh

No.	RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH					HASIL ANALISA KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Prakiraan Maju	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					29.950.634.970		**37.778.254.213**	
A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**12.868.076.345**		**15.410.906.261**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Terlaksanya Kegiatan Perencanaan dan pelaporan**		**172.186.360**		**315.371.889**	
1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Banda Aceh	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dok	172.186.360	6 Dok	315.371.889	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Terbayarnya gaji dan tunjangan aparatur**		**7.370.045.420**		**8.028.896.803**	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Banda Aceh	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	7.329.274.420	48 Orang	7.869.534.750	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Banda Aceh	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	40.771.000	1 Laporan	159.362.053	
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Kegiatan Pelayanan Penunjang Administrasi Perkantoran**		**563.634.718**		**2.275.303.242**	
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Banda Aceh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	60.000.000	9 Paket	78.300.167	
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banda Aceh	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	80.000.000	7 Paket	893.547.629	
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Banda Aceh	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	129.231.046	8 Paket	374.820.820	
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Banda Aceh	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	86.840.467	14 Paket	248.086.799	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Banda Aceh	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen	18.026.400	222 Dokumen	23.983.344	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banda Aceh	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	189.536.805	80 Laporan	656.564.482	
4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Tersedianya Sarana dan Prasana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**		**143.989.922**		**544.848.885**	
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banda Aceh	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	143.989.922	6 unit	544.848.885	
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah kegiatan pelayanan penunjang administrasi perkantoran**		**3.210.846.044**		**1.923.235.184**	
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banda Aceh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	19.550.000	12 Laporan	21.189.830	
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Banda Aceh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	388.434.444	12 Laporan	446.842.403	
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Banda Aceh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.802.861.600	12 Laporan	1.455.202.952	
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara**		**1.407.373.881**		**2.323.250.257**	
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banda Aceh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	840.567.081	39 Unit	1.667.093.446	
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banda Aceh	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	120 Unit	566.806.800	120 Unit	656.156.811	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				**17.082.558.625**		**20.702.871.203**	
7	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**		**Terlaksananya Sosialisasi, komunikasi, pemutakhiran informasi dan edukasi rawan bencana**		**804.329.280**		**1.341.719.200**	
16	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Provinsi	Pidie Jaya	jumlah dokumen kajian risiko bencana yang dilegalisasi	4 Dok	200.000.000	1 Dok	383.512.260	

No.	RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH					HASIL ANALISA KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Prakiraan Maju	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Aceh Besar	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	60 Orang	604.329.280	60 Orang	958.206.940	
8	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**		**Jumlah kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**		**6.453.153.407**		**8.419.139.493**	
19	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Aceh Utara	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	4 Dok	-	1 Dok	257.500.000	
20	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Aceh Tengah, Banda Aceh, Sabang	Jumlah Aparatut Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencagahan dan Mitigasi Bencana	120 Orang	3.400.000.000	70 Orang	1.589.729.810	
21	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	5 Dok	450.000.000	12 Dok	1.236.182.310	
22	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Aceh Tenggara, Banda Aceh, Nagan Raya	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	6 Unit	-	4 Paket	1.816.749.493	
23	Pengelolaan Risiko Bencana	Banda Aceh	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 Kegiatan	800.000.000	4 Dok	1.893.878.900	
24	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Aceg Tengah, Banda Aceh, Sabang	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5 Kawasan	803.153.407	3 Kawasan	1.105.022.110	
25	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Banda Aceh	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	60 Orang	700.000.000	60 Orang	206.000.000	
26	Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Aceh Utara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	314.076.870	
9	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**		**Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**		**5.127.592.000**		**6.194.430.300**	
27	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	5 Laporan	1.002.592.000	8 Laporan	1.862.200.860	
28	Penyediaan Logistik Penyelamatandan Evakuasi Korban Bencana	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	23 Kab/Kota	4.125.000.000	23 Kab/Kota	4.332.229.440	
10	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**		**Tertatanya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**		**4.697.483.938**		**4.747.582.210**	
29	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Pidie Jaya	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 dokumen	-	1 dokumen	257.500.000	
30	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Banda Aceh	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembahaan Bencana Daerah	1 Dokumen	606.000.000	1 Dokumen	687.017.210	
31	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Banda Aceh	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 dokumen	-	1 dokumen	216.300.000	
32	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Banda Aceh	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Dokumen	41.484.000	12 Dokumen	386.765.000	
33	Penanganan Pascabencana Provinsi	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) san Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	20 Dokumen	272.320.000	20 Dokumen	500.000.000	
34	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Banda Aceh	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	20 Kegiatan	2.654.079.938	20 Kegiatan	1.200.000.000	

No.	RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH					HASIL ANALISA KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Prakiraan Maju	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dala Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Banda Aceh	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	10 Lembaga	287.000.000	10 Lembaga	500.000.000	
36	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Banda Aceh	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	132 Orang	836.600.000	132 Orang	1.000.000.000	
	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				-		**1.664.476.750**	
11	**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**		**Meningkatnya pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebaran**		-		**1.664.476.750**	
37	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Banda Aceh	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen	-	1 Dokumen	213.804.980	
38	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Aceh Utara, Banda Aceh	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	2 Unit	-	1 Unit	1.236.866.791	
39	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Banda Aceh	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	60 Orang	-	60 Orang	213.804.980	

Banda Aceh, Maret 2025

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH
KEPALA PELAKSANA

Teuku Nara Setia, SE, Ak, M.Si
PEMBINA Tk.I
NIP. 19760306 200112 1 005

TABEL T - C 32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN/MASYARAKAT TAHUN 2025
PROVINSI ACEH

Nama SKPA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH

No.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOL	CATATAN
1	2	3		5	6
1	**Program Penanggulangan Bencana**				
	Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Bener Meriah	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	1 Dokumen	Migas Kab/Kota
	Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Penyusunan Dokumen Rencana Rehab Rekon Pasca Bencana (R3PB)	Pide	Tersedianya Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Penyusunan Dokumen Rencana Rehab Rekon Pasca Bencana (R3PB)	1 Paket	Migas Kab/Kota
	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten Aceh Singkil	Aceh Singkil	Tersedianya Kajian Resiko Bencana Kabupaten Aceh Singkil	1 Kegiatan	Migas Kab/Kota
	Pengadaan Mobil Truck Serba Guna	Aceh Utara	Tersedianya Mobil Truck Serba Guna	1 Unit	Migas Kab/Kota
	Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB)	Aceh Tengah	Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB)	1 Paket	Migas Kab/Kota
	Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran	Aceh Tamiang	Tersedianya Mobil Pemadam Kebakaran	1 Unit	Migas Kab/Kota
	Pengadaan Mobil Water Supply	Aceh Tamiang	Tersedianya Mobil Water Supply	1 Unit	Migas Kab/Kota
	Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Subulussalam	Tersedianya Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	1 Paket	Migas Kab/Kota
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bencana	Langsa	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Bencana	1 Kegiatan	Migas Kab/Kota
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	Langsa	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	1 Kegiatan	Migas Kab/Kota
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kota Langsa	Langsa	Tersedianya Kajian Risiko Bencana Kota Langsa	1 Kegiatan	Migas Kab/Kota
	Pengadaan Mobil Water Supply	Aceh Tenggara	Tersedianya Mobil Water Supply	1 Unit	Migas Kab/Kota
	Pengadaan Lampu Lapangan Solar Light Tower	Aceh Tenggara	Tersedianya Lampu Lapangan Solar Light Tower	1 Unit	Migas Kab/Kota
	Pengadaan Mobil Dimp Truck Serba Guna	Aceh Tenggara	Tersedianya Mobil Dimp Truck Serba Guna	1 Unit	Migas Kab/Kota
	Pengadaan Mobil Water Supply	Aceh Tenggara	Tersedianya Mobil Water Supply	1 Unit	Migas Kab/Kota
	Pengadaan Alat-alat Penanggulangan Bencana	Aceh Besar, Banda Aceh dan Sabang	Tersedianya Alat-alat Penanggulangan Bencana	1 Paket	POKIR
	Pembentukan Forum PRB 49 Gampong dan Pelatihan Destana	Aceh Utara	TerbentuknyaForum PRB 49 Gampong dan Pelatihan Destana	1 Paket	POKIR
	Pembentukan Forum PRB 50 Gampong dan Pelatihan Destana	Aceh Utara	TerbentuknyaForum PRB 50 Gampong dan Pelatihan Destana	1 Paket	POKIR
	Pembentukan Forum PRB 23 Gampong dan Pelatihan Destana	Aceh Utara	TerbentuknyaForum PRB 23 Gampong dan Pelatihan Destana	1 Paket	POKIR
	Pembangunan Balai Evakuasi Banjir	Aceh Barat	Tersedianya Balai Evakuasi Banjir	1 Unit	POKIR
	Pelatihan Manajemen Tanggap Darurat Bencana (MTDB) Bersama PMI	Aceh Utara	Terlatihnya Manajemen Tanggap Darurat Bencana (MTDB) Bersama PMI	1 Kegiatan	POKIR
	Publikasi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Banda Aceh, Aceh Besar	Terlaksananya Publikasi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 Paket	POKIR
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rescue Penanggulangan Bencana Kabupaten Pidie Jaya	Pidie Jaya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Rescue Penanggulangan Bencana Kabupaten Pidie Jaya	1 Paket	POKIR
	Pelatihan Kebencanaan (PRB)	Pidie Jaya	Terlaksananya Pelatihan Kebencanaan (PRB)	1 Paket	POKIR
	Pengadaan Mobil Rescue dan sarana pendukung untuk Kegiatan Bapera siap Tanggap (BeST)	Aceh Barat Daya	Tersedianya Mobil Rescue dan sarana pendukung untuk Kegiatan Bapera siap Tanggap (BeST)	1 Paket	POKIR
	Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Pelatihan Fasilitator Destana	Aceh Tenggara	Terbentuknya Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Pelatihan Fasilitator Destana	1 Paket	POKIR
	Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Pelatihan Fasilitator Destana	Gayo Lues	TerbentuknyaDesa Tangguh Bencana (Destana) dan Pelatihan Fasilitator Destana	1 Paket	POKIR
	Promosi dan Edukasi Kebencanaan Aceh di Media Online	Banda Aceh	Terlaksanya Promosi dan Edukasi Kebencanaan Aceh di Media Online	1 Paket	POKIR
	Rehap Pos Damkar Lueng Putu Kec. Bandar Baru	Pidie Jaya	Tersedianya Pos Damkar Lueng Putu Kec. Bandar Baru	1 Paket	POKIR
	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Roda Tiga (BENTOR)	Gayo Lues	Tersedianya Alat Pemadam Kebakaran Roda Tiga (BENTOR)	1 Paket	POKIR
	Pengadaan Alat Resque Koetaraja	Banda Aceh	Tersedianya Alat Resque Koetaraja	1 Paket	POKIR

No.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOL	CATATAN
1	2	3		5	6
	Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) dan Pelatiahan Fasilitator	Aceh Utara	Terbentuknya Desa Tangguh Bencana (DESTANA) dan Pelatiahan Fasilitator	1 Kegiatan	POKIR
	Publikasi Sosialisasi Tentang Pembinaan Penanganan dan Kebencanaan Aceh Melalui Media Cetak dan Online	Aceh Barat	Terlaksananya Publikasi Sosialisasi Tentang Pembinaan Penanganan dan Kebencanaan Aceh Melalui Media Cetak dan Online	1 Paket	POKIR
	Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Pelatihan Fasilitator	Pidie Dan Pidie Jaya	Terbentuknya Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Pelatihan Fasilitator	1 Paket	POKIR
	Pembuatan Video Dokumenter Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Ancaman Gempa dan Tsunami di Kab. Bireuen	Bireuen	Tersedianya Video Dokumenter Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Ancaman Gempa dan Tsunami di Kab. Bireuen	1 Paket	POKIR
	Pembuatan Video Dokumenter Tradisi SMONG di Masyarakat Kab. Simeulue	Simeulue	Tersedianya Video Dokumenter Tradisi SMONG di Masyarakat Kab. Simeulue	1 Paket	POKIR
	Pembuatan Video Edukasi Banjir bagi Aparatur dan Masyarakat Kab. Aceh Utara	Aceh Utara	Tersedianya Video Edukasi Banjir bagi Aparatur dan Masyarakat Kab. Aceh Utara	1 Paket	POKIR
	Kegiatanan Pelatanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana : Pengadaan Kain Sarung Untuk Masyarakat Terdampak bencana	Aceh	Tersedianya Kain Sarung untuk Masyarakat Terdampak Bencana	1 Paket	POKIR

Banda Aceh, Maret 2025

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH

KEPALA PELAKSANA

Teuku Nara Setia, SE, Ak, M.Si

PEMBINA Tk. I

NIP. 19760306 200112 1 005

Tabel T - C 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

PROVINSI ACEH

Nama SKPA : Badan Penanggulangan Bencana Aceh

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun		
						Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	4	3	5	6	7				8
1	5								29.950.634.970					37.778.254.213
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				12.868.076.345					15.410.906.261
1	5	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangk	Terlaksanya Kegiatan Perencanaan dan pelaporan			172.186.360					315.371.889
1	5	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Banda Aceh	6 Dok	172.186.360	PAA		Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	95%	315.371.889
1	5	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan aparatur			7.370.045.420					8.028.896.803
1	5	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Banda Aceh	46 Orang/bulan	7.329.274.420	DAU/PAA		Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	95%	7.869.534.750
1	5	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Banda Aceh	1 Laporan	40.771.000	PAA		Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	95%	159.362.053
1	5	1	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pelayanan Penunjang Administrasi Perkantoran			563.634.718					2.275.303.242
1	5	1	1,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Banda Aceh	5 Paket	60.000.000	PAA		Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	95%	78.300.167
1	5	1	1,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Banda Aceh	5 Paket	80.000.000	DAU		Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	95%	893.547.629
1	5	1	1,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Banda Aceh	5 Paket	129.231.046	PAA		Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	95%	374.820.820
1	5	1	1,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Banda Aceh	5 Paket	86.840.467	PAA		Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	95%	248.086.799
1	5	1	1,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Banda Aceh	5 Dokumen	18.026.400	PAA		Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	95%	23.983.344
1	5	1	1,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banda Aceh	20 Laporan	189.536.805	DBH		Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	95%	656.564.482
1	5	1	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			143.989.922					544.848.885
1	5	1	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Banda Aceh	4 unit	143.989.922	DBH		Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	95%	544.848.885
1	5	1	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pelayanan penunjang administrasi perkantoran			3.210.846.044					1.923.235.184
1	5	1	1,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banda Aceh	10 Laporan	19.550.000	PAA		Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	95%	21.189.830
1	5	1	1,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Banda Aceh	12 Laporan	388.434.444	DBH		Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	95%	446.842.403
1	5	1	1,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Banda Aceh	12 Laporan	2.802.861.600	Otsus		Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	95%	1.455.202.952
1	5	1	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara			1.407.373.881					2.323.250.257
1	5	1	1,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Banda Aceh	50 Unit	840.567.081	Otsus		Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	95%	1.667.093.446
1	5	1	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Banda Aceh	120 Unit	566.806.800	Otsus		Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	95%	656.156.811
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				17.082.558.625					20.702.871.203
1	5	3	1,01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi, komunikasi, pemutakhiran informasi dan edukasi rawan bencana			804.329.280					1.341.719.200
1	5	3	1,01	1	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Provinsi	jumlah dokumen kajian risiko bencana yang dilegalisasi	Pidie Jaya	4 Dok	200.000.000	Migas		Indeks Ketahanan Daerah	0,58/Sedang	383.512.260

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun		
						Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	4	3	5	6	7				8
1	5	3	1,01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Aceh Besar	60 Orang	604.329.280	Otsus		Indeks Ketahanan Daerah	0,58/Sedang	958.206.940
1	**5**	**3**	**1,02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Benca**	**Jumlah kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**			**6.453.153.407**					**8.419.139.493**
1	5	3	1,02	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Aceh Utara	4 Dok	-	Otsus/Migas		Indeks Ketahanan Daerah	0,58/Sedang	257.500.000
1	5	3	1,02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatut Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencagahan dan Mitigasi Bencana	Aceh Tengah, Banda Aceh, Sabang	120 Orang	3.400.000.000	Otsus		Indeks Ketahanan Daerah	0,58/Sedang	1.589.729.810
1	5	3	1,02	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Semua Kabupaten/Kota	5 Dok	450.000.000	Otsus		Indeks Ketahanan Daerah	0,58/Sedang	1.236.182.310
1	5	3	1,02	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	Aceh Tenggara, Banda Aceh, Nagan Raya	6 Unit	-	Migas/Otsus		Indeks Ketahanan Daerah	0,58/Sedang	1.816.749.493
1	5	3	1,02	5	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Banda Aceh	1 Kegiatan	800.000.000	Otsus		Indeks Ketahanan Daerah	0,58/Sedang	1.893.878.900
1	5	3	1,02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Aceg Tengah, Banda Aceh, Sabang	5 Kawasan	803.153.407	DBH		Indeks Ketahanan Daerah	0,58/Sedang	1.105.022.110
1	5	3	1,02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Banda Aceh	60 Orang	700.000.000	Otsus		Indeks Ketahanan Daerah	0,58/Sedang	206.000.000
1	5	3	1,02	8	Gladi Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi	Aceh Utara	1 Laporan	300.000.000	Otsus		Indeks Ketahanan Daerah	0,58/Sedang	314.076.870
1	**5**	**3**	**1,03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**			**5.127.592.000**					**6.194.430.300**
1	5	3	1,03	2	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Semua Kabupaten/Kota	5 Laporan	1.002.592.000	Otsus		Indeks Ketahanan Daerah	0,58/Sedang	1.862.200.860
1	5	3	1,03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatandan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Semua Kabupaten/Kota	23 Kab/Kota	4.125.000.000	Otsus		Indeks Ketahanan Daerah	0,58/Sedang	4.332.229.440
1	**5**	**3**	**1,04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Tertatanya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**			**4.697.483.938**					**4.747.582.210**
1	5	3	1,04	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Pidie Jaya	1 dokumen	-	Otsus		Indeks Ketahanan Daerah	0,58/Sedang	257.500.000
1	5	3	1,04	2	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembahaan Bencana Daerah	Banda Aceh	1 Dokumen	606.000.000	Otsus		Indeks Ketahanan Daerah	0,58/Sedang	687.017.210
1	5	3	1,04	3	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Banda Aceh	1 dokumen	-	Otsus		Indeks Ketahanan Daerah	0,58/Sedang	216.300.000
1	5	3	1,04	4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Dasar Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Banda Aceh	1 Dokumen	41.484.000	Otsus		Indeks Ketahanan Daerah	0,58/Sedang	386.765.000
1	5	3	1,04	7	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) san Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Semua Kabupaten/Kota	20 Dokumen	272.320.000	Migas		Indeks Ketahanan Daerah	0,58/Sedang	500.000.000
1	5	3	1,04	9	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Banda Aceh	20 Kegiatan	2.654.079.938	Migas		Indeks Ketahanan Daerah	0,58/Sedang	1.200.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun		
						Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	4	3	5	6	7				8
1	5	3	1,04	10	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dala Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Banda Aceh	10 Lembaga	287.000.000	Migas		Indeks Ketahanan Daerah	0,58/Sedang	500.000.000
1	5	3	1,04	13	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Banda Aceh	132 Orang	836.600.000	Migas		Indeks Ketahanan Daerah	0,58/Sedang	1.000.000.000
1	5	4			**PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**				-					**1.664.476.750**
1	**5**	**4**	**1,01**		**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**	**Meningkatnya pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebaran**			-					**1.664.476.750**
1	5	4	1,01	1	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Banda Aceh	1 Dokumen	-	Otsus		Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	60%	213.804.980
1	5	4	1,01	5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	Aceh Utara, Banda Aceh	2 Unit	-	Migas		Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	60%	1.236.866.791
1	5	4	1,01	9	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Banda Aceh	60 Orang	-	Otsus		Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	60%	213.804.980

Banda Aceh, Maret 2025

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH
KEPALA PELAKSANA

Teuku Nara Setia, SE, Ak, M.Si
PEMBINA Tk. I
NIP. 19760306 200112 1 005